

ANALISIS PENGARUH PAD, DAU, DAK, DAN DBH TERHADAP BELANJA LANGSUNG, SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

Studi Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Timur 2010-2014

Pendekatan *Path Analysis*

Ika Noer Rizky

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

Email : Ikaa.rizky21@gmail.com

ABSTRAK

The study aims to determine the effect of Local revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Revenue Sharing Fund (DBH) to direct expenditure, as well as their impact on economic growth at the District/City in East Java. The method used in this research is quantitative with a population consisting of 38 Districts/City in East Java. The data used is data GDP at constant prices to see economic growth and local revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Revenue Sharing Fund (DBH), and direct expenditure in the District/City East Java from 2010-2014. The data is sourced from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) and the Central Statistics Agency East Java (BPS), as well as sources of other relevant financial data. Tests conducted by the path analysis (path analysis). The analysis of the first model showed that the partial revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Revenue Sharing Fund (DBH) significantly affects direct expenditure. While the Special Allocation Fund (DAK) no significant effect on direct expenditure. The results of the analysis of the second model shows that the Local Revenue (PAD), Revenue Sharing Fund (DBH) and direct expenditure significantly affects economic growth, while the General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) no significant effect on economic growth.

Key Words : Local Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Revenue Sharing Fund (DBH), Direct Expenditure, and Economic Growth.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah dalam era reformasi sangat penting dilaksanakan dan perlu ditingkatkan, begitu juga dengan pembangunan ekonomi, karena merupakan suatu bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga tidak dapat terlepas dari prinsip otonomi daerah. Kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif) tersebut merupakan kebijakan yang dipandang secara demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya. Sebagai akibat dari pelaksanaan desentralisasi, timbullah daerah-daerah otonom. Daerah otonom mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan daerahnya. Dengan demikian daerah otonom adalah daerah yang berhak dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Keberhasilan suatu penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari kemampuan daerahnya, karena kemampuan keuangan ini merupakan salah satu indikator penting guna mengukur tingkat otonomi suatu daerah. Begitu juga dengan Pemerintah Pusat sebagaimana yang diungkapkan oleh Khusaini (2006) bahwa pemerintah pusat masih memiliki wewenang terkait dengan aspek-aspek penerimaan. Sehingga hal ini pun memicu perilaku pemerintah terkait peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Provinsi Jawa Timur didukung keadaan geografis dengan beragam topografi yang dapat dijadikan potensi dalam pendapatan daerah. Rata-rata tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Langsung pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang semakin meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan adanya keberhasilan upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan hasil pendapatan asli daerah (PAD) meskipun di tahun 2014 mengalami penurunan. Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur lebih besar dari Dana transfer dari pemerintah pusat atau dana perimbangan (DAK dan DBH) menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur dapat dikatakan sudah mandiri dan tidak tergantung pada alokasi transfer dana pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semakin meningkat juga diiringi dengan penggunaan belanja langsung yang tinggi pula. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah yang terbesar dari tiga jenis Dana Perimbangan tersebut, diikuti oleh Dana Bagi Hasil (DBH) dan yang terkecil adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), walaupun demikian, Dana Alokasi Khusus (DAK) juga menunjukkan *trend* peningkatan. Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk pemerataan keuangan tiap daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sehingga dapat dialokasikan dalam membiayai belanja-belanja seperti belanja langsung maupun belanja tidak langsung guna memenuhi kebutuhan daerahnya. Belanja tidak langsung dan belanja langsung dari tahun ke tahun semakin meningkat secara signifikan. Akan tetapi anggaran belanja langsung lebih kecil daripada belanja tidak langsung. Padahal alokasi belanja langsung yang terdiri dari komponen belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa yang dipandang lebih mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pelayanan publik. Melihat kondisi ini, Pemerintah Daerah seharusnya dapat mengalokasikan anggarannya untuk Belanja langsung dan tidak habis untuk belanja pegawai maupun belanja yang bersifat rutin saja.

Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya. Apabila ternyata ditemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, maka besar kemungkinan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai DAU, DAK, dan DBH (Dana Perimbangan) pada umumnya lebih besar dibandingkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

B. TINJAUAN PUSTAKA

Hubungan Keuangan Pusat-Daerah

Hubungan keuangan antara pusat dan daerah atau secara spesifik dikenal dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekosentrasi dan tugas pembantuan (Pasal 1 UU No. 33 Tahun 2004).

Belanja Langsung

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung sesuai dengan pelaksanaan program kegiatan. Program

merupakan penjabaran dari kebijakan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 3, disebutkan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan dari desentralisasi.

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU merupakan suatu dana perimbangan yang memiliki tujuan utama dalam pengurangan kesenjangan fiskal antar daerah. Menurut Undang-undang Republik Indonesia no 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah mengatakan bahwa rumus dana alokasi umum sebagaimana dimaksud adalah :

$$\text{Jumlah Umum untuk Daerah Provinsi} = \frac{\text{Bobot Daerah Provinsi yang bersangkutan}}{\text{Jumlah Bobot dari seluruh Daerah Provinsi}}$$

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan suatu bentuk transfer pusat guna mendanai kewenangan yang telah didesentralisasikan, yang juga sekaligus mengemban tugas untuk mendukung prioritas nasional. DAK (Dana Alokasi Khusus) memiliki karakter yang paling spesifik di antara dana transfer lainnya, dimana DAK (Dana Alokasi Khusus) hanya dapat digunakan sesuai dengan menu kegiatan yang ditetapkan oleh Departemen Teknis yang terkait dengan bidang alokasi DAK (Dana Alokasi Khusus), dan dapat dikategorikan sebagai *matching grant* karena adanya kewajiban penyediaan dana pendamping dan sekaligus *restricted grant* karena karakternya sebagai *categorical grant-in-aid* (Mardiasmo, 2006).

Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan suatu dana perimbangan yang strategis bagi daerah-daerah yang memiliki sumber-sumber penerimaan pusat di daerahnya, meliputi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), pajak pusat dan bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan penerimaan dan sumber daya alam (Minyak Bumi, Gas Alam, Pertambangan Umum, Kehutanan, dan Perikanan). Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, bagian daerah dari pajak maupun sumber daya alam tersebut telah ditetapkan besarnya berdasarkan suatu persentase. Bagi Pemerintah Daerah yang memperoleh alokasi DBH yang cukup signifikan, pemanfaatan dana tersebut dilakukan secara optimal dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan infrastruktur dasar di daerah.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Saad (2009) pertumbuhan ekonomi merupakan dasar pembangunan berkelanjutan. Pemerintah dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memprioritaskan perbaikan infrastruktur, peningkatan pendidikan, pelayanan kesehatan, membangun fasilitas yang dapat mendorong investasi baik asing maupun lokal, menyediakan perumahan dengan biaya rendah, melakukan restorasi lingkungan serta penguatan pada sektor pertanian.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator dalam melihat gejala pertumbuhan ekonomi yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) karena PDRB dapat menggambarkan aktivitas perekonomian yang dilaksanakan dan dapat dicapai pada satu periode. Menurut Djoyohadikusumo (1994) secara makro apabila pada suatu daerah, produksi barang dan jasanya meningkat maka setiap tahunnya tercermin pada peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per tahun, sedangkan secara mikro tercermin melalui PDRB per kapitanya. Dalam data statistik data PDRB terdiri pada dua kategori penilaian diantaranya atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

Teori Makro : Keterkaitan Pengeluaran Pemerintah dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Dimana apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Guritno, 1994). Seperti pada teori Adolf Wagner yang menyatakan bahwa bahwa aktifitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat. Wagner mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap PDB dengan mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap PDB.

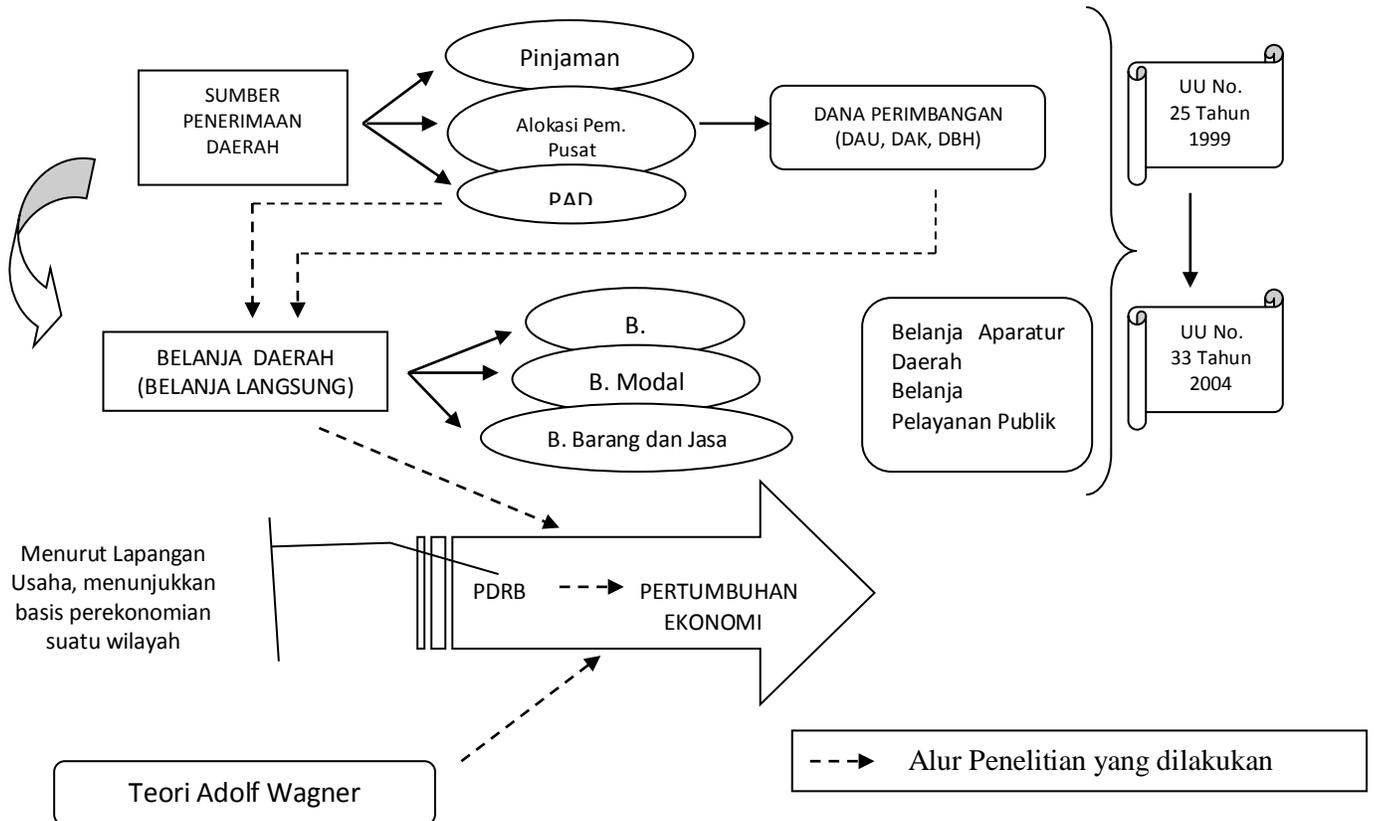
Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan memiliki perbedaan dan persamaan, yang **pertama** penelitian dari Hidayah (2014) yang berjudul Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Aceh). Model analisis kausal dengan menggunakan regresi berganda, dimana hasil penelitian menunjukkan secara parsial PAD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja langsung sedangkan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung. **Kedua**, penelitian dari Mawarni (2013) yang berjudul pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan studi pada Kabupaten dan Kota di Aceh. Menggunakan metode analisis jalur (*path*) dengan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial bahwa, PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal dan berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. **Ketiga**, penelitian dari Setiyawati (2007) berjudul Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran dengan pendekatan analisis jalur dengan regresi linier. Hasil dari penelitian tersebut secara parsial menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAU berpengaruh negative terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negative terhadap kemiskinan dan berpengaruh positif terhadap pengangguran.

Kerangka Pikir

Pada subbab ini peneliti memaparkan kerangka pikir penelitian yang menjadi dasar dalam melihat pengaruh variabel-variabel yang terkait. Selanjutnya berikut alur pemikiran dalam penelitian ini :

Gambar 1 : Kerangka Pikir Penelitian



Sumber : Diolah, Peneliti, 2016.

Hipotesis

Adapun hipotesis yang merupakan jawaban sementara yang dilakukan dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*), mengacu pada landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

- Ha 1 : PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan secara simultan maupun parsial terhadap Belanja Langsung.
- Ha 2 : PAD, DAU, DAK, DBH, dan Belanja Langsung berpengaruh signifikan secara simultan maupun parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang merupakan suatu penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diterbitkan oleh lembaga resmi pemerintah, seperti Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik Jawa Timur, serta sumber-sumber data keuangan lain yang relevan. Yang meliputi data keuangan realisasi APBD yakni PAD, DAU, DAK, DBH, dan belanja langsung, serta data pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2010 sampai dengan 2014, pada 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, dengan metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Menurut Ghozali (2005) analisis jalur pertama kali diperkenalkan oleh Sewall Wright seorang ahli genetika untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori baik pengaruh langsung maupun tidak langsung dari himpunan variabel bebas terhadap variabel terikat. Secara matematika dalam Setiyawati (2007) analisis jalur mengikuti pola model struktural sebagai berikut :

- a. Model Struktural I

$$X_5 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \mu$$

- b. Model Struktural II

$$Y = \alpha + \gamma X_5 + \mu$$

Dimana :

X_5 = Belanja Langsung

Y = Pertumbuhan Ekonomi

β, γ = Koefisien

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi yang menggambarkan pengaruh variabel X_1 terhadap β_1

β_2 = Koefisien regresi yang menggambarkan pengaruh variabel X_2 terhadap β_2

β_3 = Koefisien regresi yang menggambarkan pengaruh variabel X_3 terhadap β_3

β_4 = Koefisien regresi yang menggambarkan pengaruh variabel X_4 terhadap β_4

X_1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X_2 = Dana Alokasi Umum (DAU)

X_3 = Dana Alokasi Khusus (DAK)

X_4 = Dana Bagi Hasil (DBH)

μ = eror

Uji F

Uji ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Uji t

Uji t bertujuan untuk mengetahui koefisien regresi pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

D. PEMBAHASAN

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan hasil statistik deskriptif dan *path analysis* menggunakan regresi linier. Berikut untuk hasil pengujian data dengan statistik deskriptif.

Hasil Uji Model I (PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Belanja Langsung)

Tabel 1 : Koefisien Determinan Model I

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.921 ^a	.847	.844	.23957	1.124

a. Predictors: (Constant), DBH, DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: BL

Sumber : Output Data Spss 21, Data Diolah, 2016.

Besarnya sumbangan (kontribusi) variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Belanja Langsung dapat dilihat dari nilai *R Square* yaitu sebesar 0,847. Artinya bahwa 84,7% variabel Belanja Langsung akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu PAD, DAU, DAK, dan DBH. Sedangkan sisanya 15,3% variabel Belanja Langsung akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini seperti pada tabel 1.

Tabel 2 : Uji F Model I (Uji Secara Simultan)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	58.958	4	14.739	256.820	.000 ^a
	Residual	10.618	185	.057		
	Total	69.575	189			

a. Predictors: (Constant), DBH, DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: BL

Sumber : Output data spss 21, Data diolah, 2016.

Pada tabel 2 menunjukkan hasil perhitungan pada Uji F statistik sebesar 256.820 dengan nilai probabilitas 0.000. Dikarenakan nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05, maka ini dapat diartikan bahwa secara serempak semua variabel independen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh signifikan.

Tabel 3 : Hasil Analisis (*Path*) Model I (PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Belanja Langsung)

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.881	.656		2.867	.005		
	PAD	.480	.035	.671	13.778	.000	.347	2.879
	DAU	.253	.092	.169	2.749	.007	.217	4.607
	DAK	.059	.058	.051	1.020	.309	.325	3.075
	DBH	.138	.039	.143	3.506	.001	.497	2.011

a. Dependent Variable: BL

Sumber : Output data spss 21, data diolah, 2016.

Dengan mengacu pada tabel 3 tersebut dapat dilihat bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja langsung. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Setiyawati (2007) dan Syammi (2014). Semakin tinggi PAD maka akan cenderung meningkatkan pengeluaran pemerintah dalam hal pengeluaran rutin dan modal. Ini dikarenakan dalam rangka perbaikan dan peningkatan infrastruktur maupun pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan daerahnya. DAU juga berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung dimana penelitian ini sesuai dengan penelitian Hidayah (2014). Ini menunjukkan bahwa semakin besar DAU yang diperoleh maka akan memperbesar belanja langsung. Ini dikarenakan nilai rata-rata DAU Kab/Kota yang cukup besar sehingga dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah. Berbeda dengan DAK yang tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013). Hal ini dikarenakan karakteristik DAK yang peruntukkannya cukup spesifik seperti bencana alam, banjir, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), dan lain-lain sehingga alokasi pada tiap daerahnya pun berbeda-beda. Seperti ditunjukkan pada tabel berikut mengenai rata-rata DAK tiap kabupaten/kota di Jawa Timur :

Tabel 4: Rata-rata DAK Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (*dalam jutaan rupiah*)

DAK	2010	2011	2012	2013	2014
		48,342	56,943	57,834	58,434

Sumber : DJPK, 2011

Selanjutnya untuk DBH memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja langsung yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013). Hal ini menjelaskan bahwa daerah yang mendapatkan DBH besar maka akan cenderung memiliki belanja pemerintah yang meningkat. Hasil ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja pemerintah akan dipengaruhi oleh penerimaan DBH.

Hasil Uji Model II (Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi)

Tabel 5 : Koefisien Determinan Model II

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.855 ^a	.731	.723	.50423	2.133

a. Predictors: (Constant), BL, DAK, DBH, DAU, PAD

b. Dependent Variable: PE

Sumber : Output Data Spss 21, Data Diolah, 2016.

Besarnya sumbangan (kontribusi) variabel belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi dapat dilihat dari nilai *R Square* yaitu sebesar 0,731. Artinya bahwa 73,1% variabel Pertumbuhan Ekonomi akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya belanja Langsung. Sedangkan sisanya 26,9% variabel Pertumbuhan Ekonomi akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini seperti pada tabel 5.

Tabel 6 : Uji F (Uji simultan PAD, DAU, DAK, DBH, dan Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	126.884	5	25.377	99.811	.000 ^a
	Residual	46.782	184	.254		
	Total	173.666	189			

a. Predictors: (Constant), BL, DAK, DBH, DAU, PAD

b. Dependent Variable: PE

Sumber : Output Data Spss 21, Data diolah, 2016.

Pada tabel 6 menunjukkan hasil perhitungan pada Uji F statistik sebesar 99.811 dengan nilai probabilitas 0.000. Dikarenakan nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05, maka secara serempak semua variabel independen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Belanja Langsung (BL) memiliki pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE).

Tabel 7 Hasil Analisis Jalur (*Path*) Secara Parsial (PAD, DAU, DAK, DBH, dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi)

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-13.598	1.411		-9.635	.000
	PAD	.806	.104	.713	7.720	.000
	DAU	.336	.197	.143	1.704	.090
	DAK	.050	.123	.027	.405	.686
	DBH	.738	.086	.483	8.618	.000
	BL	.654	.155	.414	4.229	.000

a. Dependent Variable: PE

Sumber : Output Data Spss 21, Data diolah, 2016.

Dengan mengacu pada tabel 7 tersebut dapat dilihat bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Setiyawati (2007). Semakin tinggi PAD maka akan semakin meningkat laju pertumbuhan ekonomi. Ini dikarenakan oleh pajak dan retribusi daerah yang dikembalikan kepada masyarakat untuk mengembangkan dan pertumbuhan ekonomi. Ini dikarenakan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperuntukkan untuk pemerataan keuangan tiap daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan ditetapkan berdasarkan bobot masing-masing daerah sesuai dengan kebutuhan wilayah ekonomi dan potensi daerah. Begitu juga dengan dana Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperoleh tidak keseluruhan digunakan untuk pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena Dana Alokasi Umum (DAU) yang cukup besar digunakan untuk membiayai belanja yang lain seperti belanja pegawai pada pos belanja tidak langsung yang nilainya lebih besar daripada belanja langsung. Seperti pada tabel dibawah ini :

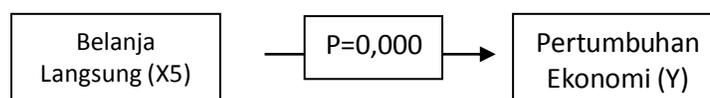
Tabel 8 : Rata-rata Belanja Tidak Langsung Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur (Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014
Belanja tidak Langsung	617,319	692,942	771,581	868,538	951,047
- Belanja Pegawai	480,619	583,534	659,237	743,854	818,953

Sumber : DJPK, Data diolah, 2011.

Begitu juga dengan DAK yang tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana penelitian ini sesuai dengan penelitian Setiyawati (2007). Seperti pada tabel 5 rata-rata DAK Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan bahwa nilai DAK yang kecil dikarenakan karakteristik DAK yang cukup spesifik, dimana tiap periodenya dan harus memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN.

Gambar 2 : Uji Validasi Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi



Sumber : Peneliti, 2016.

Selanjutnya yaitu belanja langsung yang berpengaruh signifikan ($p=0,000$) terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti pada gambar 2. Hal ini berarti bahwa dengan kenaikan belanja langsung maka akan cenderung meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga terwujudnya pertumbuhan ekonomi akan dapat terlihat melalui adanya upaya peningkatan pelayanan publik melalui program pembangunan maupun perbaikan infrastruktur yang lebih baik. Namun menurut Wijayanti (2015) bahwa terwujudnya pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata dapat terjadi melalui pembangunan infrastruktur, sarana, dan prasarana pada suatu daerah, melainkan juga faktor lain seperti peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, serta jaminan sosial.

Tabel 9 : Pengaruh Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Variabel Belanja Langsung

Variabel Bebas	Variabel Terikat	pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak langsung
PAD	PE	0.713	0,277
DAU		0.143	0,069
DAK		0,027	0,021
DBH		0.483	0,059
BL		0.414	

Sumber : Data Sekunder, Diolah, 2016.

Berdasarkan Tabel 9 menunjukkan adanya pengaruh tidak langsung dari Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Langsung. Besar pengaruh tidak langsung adalah sebesar $0,671 \times 0,414 = 0,277$ atau sebesar 27%. Ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkatkan Belanja Langsung, selanjutnya Belanja Langsung berpengaruh positif pada Pertumbuhan Ekonomi. Besar pengaruh tidak langsung Dana Alokasi Umum (X_2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Langsung adalah sebesar $0,169 \times 0,414 = 0,069$ atau sebesar 6,9%. Ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dapat meningkatkan Belanja Langsung, selanjutnya Belanja Langsung berpengaruh positif pada Pertumbuhan Ekonomi. Kemudian pengaruh tidak langsung antara Dana Alokasi Khusus (X_3) terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Langsung adalah sebesar $0,051 \times 0,414 = 0,021$ atau sebesar 2,1%. Ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat meningkatkan Belanja Langsung, kemudian Belanja Langsung berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Besar pengaruh tidak langsung antara Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) melalui Belanja Langsung adalah sebesar $0,143 \times 0,414 = 0,059$ atau sebesar 5,9%. Ini menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) dapat meningkatkan Belanja Langsung, selanjutnya Belanja Langsung berpengaruh positif pada Pertumbuhan Ekonomi.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Langsung, serta dampak yang akan ditimbulkan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Jawa Timur. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, hasil analisis dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dari penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada model pertama PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung, sehingga hipotesis Ha 1 diterima. Begitu juga dengan uji model kedua PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga hipotesis Ha 2 diterima
2. Pada model pertama DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung, sehingga hipotesis Ha 1 diterima. Namun pada uji model kedua DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga hipotesis Ha 2 ditolak.
3. Pada model pertama DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung, sehingga hipotesis Ha 1 ditolak. Begitu juga dengan uji model kedua DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga hipotesis Ha 2 ditolak.
4. Pada model pertama DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung, sehingga hipotesis Ha 1 diterima. Begitu juga dengan uji model kedua DBH berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga hipotesis Ha 2 diterima
5. Belanja langsung berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada uji secara simultan kedua model memiliki pengaruh yang signifikan, sehingga hipotesis Ha 1 dan Ha 2 dapat diterima.

Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dengan melihat hasil penelitian dan keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini maka dapat diambil saran sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur agar memprioritaskan atau memanfaatkan alokasi DAU (Dana Alokasi Umum) yang cukup besar pada bidang-bidang yang langsung berhubungan dengan kepentingan publik, misalnya seperti perbaikan infrastruktur, sarana dan prasara atau fasilitas-fasilitas publik yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Diharapkan pihak perusahaan ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dapat mempertahankan serta meningkatkan pelayanan terhadap Pendapatan Asli Daerah, karena variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan dan dominan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Langsung, misalnya dengan meningkatkan potensi penerimaan daerah.
3. Semakin meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan wujud pembangunan daerah, misalnya dengan lebih memprioritaskan pada bidang-bidang pemeliharaan atau perbaikan infrastruktur terutama pada daerah-daerah terpencil guna menunjang aktivitas sektor-sektor yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi seperti sektor industri, perdagangan, jasa, dan seketor lainnya, sehingga alokasi tidak terfokus pada belanja yang bersifat rutin saja tetapi juga pada belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan pembangunan daerah.
4. Mengingat variabel bebas dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain seperti pajak daerah, retribusi daerah, dana dekonsentrasi, hasil kekayaan daerah dan lain-lain yang terkait dengan Belanja Langsung dan Pertumbuhan Ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program Spss* edisi 3. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hidayah, Nurul & Hari Setiyawati. 2014. *Pengaruh DAU, DAK, dan PAD terhadap Belanja Langsung di Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Akuntansi Vol XVIII No. 1, 45-58. Jakarta: Universitas Mercu Buana.
- Khusaini, Moh. 2006. *Kajian Desentralisasi Fiskal, Pengaruhnya Terhadap Efisiensi Ekonomi, Sektor Publik, Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Kabupaten/Kota Di Jawa Timur)*. Malang: Prasetya UB
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
- Mawarni, Darwanis & Syukri Abdullah. 2013. *Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Aceh)*. Jurnal Akuntansi ISSN Vol. II No. 2. Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
- Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 *Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah* (hukum.unsrat.ac.id/men/mendagri_115_2006.pdf) diakses pada 17 November 2015
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 *Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah* (www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2000/16TAHUN2000PP.htm) diakses pada 17 November 2015
- Permendagri Nomor 13 tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* (hukum.unsrat.ac.id/men/permendagri_13_2006.pdf) diakses pada 17 November 2015
- Saad, W. dan Kamel Kalakech. 2009. *The Nature of Governement Expenditure and its impact on sustainable Economic Growth*. *Middle Eastern Finance and Economics*. Vol 1, No. 4. Hal 39-47.
- Sayang, Sabulon. 2005. *Pengaruh DBH, DAU, dan PAD terhadap Belanja Daerah*. Tesis (tidak diterbitkan). Malang: Pascasarjana Universitas Brawijaya
- Setiyawati, Anis & Ardi Hamzah. 2007. *Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran : Pendekatan Analisis Jalur*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol. 4 No. 2, 211-228. Universitas Trunojoyo
- Syamni, Ghazali dkk. 2014. *Hubungan PAD Terhadap Belanja Langsung di Kabupaten Aceh Utara*. Jurnal Kebangsaan ISSN Vol. 3 No. 5
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah* (www.djpk.depkeu.go.id/?p=367) diakses pada 17 November 2015
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah* (www.sjdih.kemenkeu.go.id/fullText/1999/25TAHUN~1999UU.Htm) diakses pada 17 November 2015
- Wijayanti, Ni Kadek Herni. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kesejahteraan Sosial Melalui Pertumbuhan Ekonomi*. E-Jurnal EP UNUD ISSN 2303-0178
- www.djpk.go.id Diakses pada 17 November 2015
- www.bpsjatim.go.id Diakses pada 17 November 2015